

SKRIPSI

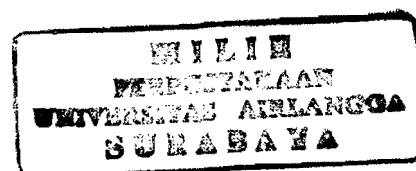
PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG

Per 119 /05
Pus
P



AMANDA PUSPITA
030115230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH INDUSTRI
DI KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing



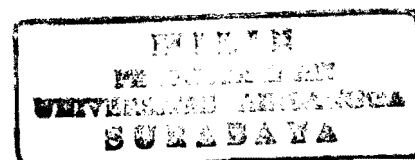
Lisman Iskandar, S.H., M.S
NIP. 130 675 526

Penyusun



Amanda Puspita
NIM 030115230

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum yang ada dalam perjanjian penggunaan tanah industri antara pihak pengelola, PT. JIEP dengan Investor adalah hubungan perijinan yaitu pihak Investor meminta ijin untuk menggunakan dan menempati tanah kapling yang dibelinya. Dan perjanjian penggunaan tanah industri digunakan sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah atas nama investor yang baru, selain perjanjian jual beli. Adanya perjanjian penggunaan tanah industri di kawasan Industri Pulogadung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemeberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftaranya dan adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut pasal 1338 BW.
- b. Dalam hal pihak investor ingin mengalihkan tanah kapling industri kepada investor lain harus seijin PT. JIEP. Jika investor, dalam hal mengalihkan tanah kapling investor tanpa seijin pihak pengelola PT. JIEP berarti pihak investor telah melakukan wanprestasi. Dalam hal pihak investor telah melakukan wanprestasi maka pihak investor harus menanggung semua akibat hukum atas wanprestasi yang telah dilakukannya.

2. Saran

- a. Dalam perjanjian penggunaan tanah industri yang ada di kawasan industri Pulogadung isi dan syarat-syarat yang ada dalam perjanjian penggunaan tanah industri dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola, PT. JIEP. Untuk menciptakan keseimbangan kedudukan antara pihak investor dan pihak pengelola, perlu kiranya memberikan kesempatan kepada investor untuk mengajukan usulan perubahan terhadap klausula yang ada dalam perjanjian penggunaan tanah industri dengan tanpa merubah esensi dari perjanjian penggunaan tanah industri yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 1977.
- b. Pihak investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum khususnya yang berkaitan dengan pengalihan tanah kapling industri. Dengan mematuhi segala peraturan dan perjanjian penggunaan tanah industri yang telah disepakati antara pihak investor dengan pihak pengelola, PT. JIEP. Hal tersebut ditujukan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan pihak investor dalam menempati dan menggunakan tanah kapling industri yang ada di kawasan industri Pulogadung.